



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

BUKU SAKU

FAQ

“Frequently Asked Question”

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2025

DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK



ditrenduk_kemendukbangga



ditrendukbkkbn22@gmail.com



+6281234456919





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

FAQ

*“Frequently Asked
Question”*

**PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN**



Tim Penyusun
BUKU

Pengarah:

Dr. Eng. Bonivastus Prasetya
Ichtiarto

Penanggung Jawab:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

Penulis:

Aida Novia, S.A.P.
Riski Putri, S.Sos
Alfina Oktaviani, S.I.P
Isnaini Desty Nur Laily, S.I.P.

Editor:

Sri Haryanto, S.I.P., MAPS

Layout:

Isnaini Desty Nur Laily, S.I.P.

Kata Pengantar



LINA WIDYASTUTI, SKM, MAPS

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Buku Saku Frequently Asked Questions (FAQ) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ini dapat diselesaikan. Buku saku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah, praktis, dan seragam bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.

Pembangunan kependudukan yang efektif memerlukan indikator, konsep, dan mekanisme kerja yang dipahami secara konsisten oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, buku saku FAQ ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Informasi dirangkum secara ringkas dalam format tanya-jawab agar dapat menjadi panduan cepat bagi pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam memahami dan melaksanakan PJPK secara lebih terarah, aplikatif, dan konsisten.

Akhir kata, kami berharap pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan buku ini sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPK di daerah.

Jakarta, November 2025
Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk,

Lina Widyastuti, SKM, MAPS



DAFTAR ISI

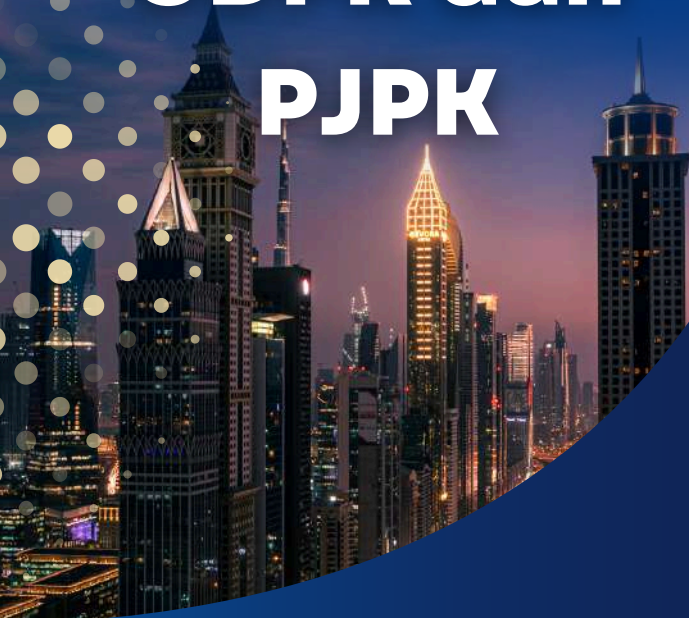
01	GDPK DAN PJP
05	DOKUMEN PJP DAERAH
08	LEGALITAS PJP
10	TIM PELAKSANA PJP
14	INDIKATOR PJP
22	PENGAMPU INDIKATOR PJP DI DAERAH
24	INTERNALISASI PJP KE DALAM DOKRENDA
27	LAIN-LAIN





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

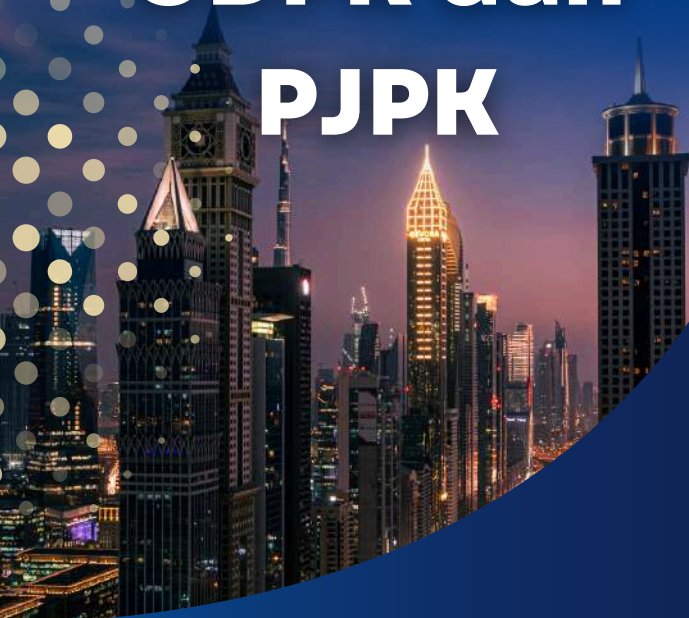
GDPK dan PJPK





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

GDPK dan PJPK



Pertanyaan

Bagaimana **hubungan** antara Grand Design Pembangunan Kependudukan (**GDPK**) dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (**PJPK**)?

Jawaban

Terdapat **kesinambungan** antara GDPK dengan PJPK. Sejumlah provinsi serta kabupaten/kota telah menyusun *roadmap* dalam kerangka GDPK. Namun demikian, *roadmap* yang telah disusun tersebut belum memuat aspek operasionalisasi maupun rencana aksi yang terperinci. Melalui PJPK, operasionalisasi dan pembaruan perencanaan pembangunan kependudukan dalam lima tahunan dilakukan sehingga **PJPK merupakan operasionalisasi dari GDPK.**

Pertanyaan

Bagaimana daerah yang sedang menyusun atau merevisi GDPK? Apakah harus menyesuaikan dengan DBPK Nasional?

Jawaban

Bagi daerah yang tahun 2025 ini telah menganggarkan penyusunan GDPK maka dapat merealisasikan kegiatan penyusunan GDPK dengan berpedoman pada peraturan yang saat ini masih berlaku yaitu Perpres 153 Tahun 2014 Tentang GDPK. Selain menyusun GDPK, pemerintah daerah agar sekaligus menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.

Pertanyaan

Apakah daerah yang sedang menyusun Ranperda GDPK perlu ditunda menunggu hasil revisi Perpres 153 Tahun 2014?

Jawaban

Bagi daerah yang sedang menyusun Ranperda GDPK dapat tetap dilanjutkan. Saat ini yang masih berlaku adalah Perpres 153 Tahun 2014 tentang GDPK dan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Dokumen PJPK Daerah





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Dokumen PJPK Daerah



Pertanyaan

Apakah penyusunan PJPK harus selesai dalam bentuk dokumen lengkap dan sesuai dengan linimasa yang ditetapkan oleh Pusat bagi daerah yang belum memiliki anggaran penyusunan PJPK?

Jawaban

Terkait anggaran untuk penyusunan PJPK agar dibahas dan diputuskan oleh pimpinan daerah atau Tim Pelaksana GDPK – PJPK di daerah. Daerah diharapkan selesai menyusun dokumen PJPK secara lengkap dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai lini masa yang telah ditetapkan. Hal ini mempertimbangkan urgensi PJPK dalam perencanaan pembangunan kependudukan di daerah yang perlu diimplementasikan untuk mencapai target-target pembangunan kependudukan.

Pertanyaan

Bagaimana dengan **periode** dokumen **RPJMD** bagi daerah yang **menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**? Apakah **periode** tahunnya **2025-2029** atau berbeda sehubungan dengan implikasinya terhadap proses internalisasi PJPk kedalam dokumen **RPJMD**?

Jawaban

PJPk agar **tetap dapat disusun** dengan **periode** yang sama yaitu **Tahun 2025 - 2029**. Sejalan dengan adanya PSU ini maka akan memiliki peluang waktu lebih dalam internalisasi PJPk dalam dokumen **RPJMD** dan **Renstra Perangkat Daerah**.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Legalitas PJPK





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Legalitas PJPK



Pertanyaan

Apa **dasar hukum** bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk **menyusun dokumen PJPK** dalam dokumen perencanaan daerah?

Jawaban

Dasar hukum PJPK saat ini yang masih berlaku adalah **Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014** tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Legalitas ini akan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kemendukbangga/BKKBN yang mengatur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan rancangan Permen.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Tim Pelaksana PJPK



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Tim Pelaksana PJPK

Pertanyaan

Apakah daerah harus membentuk tim baru penyusun atau pelaksana PJPK atau dapat menggunakan tim penyusun atau pelaksana GDPK?

Jawaban

Sebaiknya dibentuk baru untuk tim penyusun dan pelaksana PJPK. Namun, jika diperlukan pembaharuan tim (SK) bisa dilakukan sebagai dasar untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan lintas sektor terkait menjadi sebuah tim dalam penyusunan dan internalisasi PJPK dalam dokumen perencanaan daerah.

Pertanyaan

Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim penyusun dan pelaksana PJPK?

Jawaban

Pembagian peran dan tanggung jawab sesuai dengan struktur tim dengan mempertimbangkan kewenangan, keahlian dan peran dalam perencanaan pembangunan kependudukan daerah. Untuk efektivitas pengorganisasian, agar dibentuk kelompok-kelompok kerja berdasarkan lima sasaran dan ditunjuk koordinatornya. Untuk pembagian tugas dalam tim bisa diuraikan secara lebih rinci dan detail dalam SK Tim.

Pertanyaan

Instansi manakah yang bertanggung jawab dalam penyusunan PJPK ini?

Jawaban

Hampir sama polanya dalam penyusunan GDPK sebelumnya. Diharapkan **dinas yang menangani pengendalian penduduk dan KB** dapat menginisiasi dengan dukungan penuh koordinasi dari Bappeda/Bappelitbangda. Dalam penyusunan PJPK ini tentunya ada keterlibatan aktif dari instansi/dinas terkait.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Indikator PJPK





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Indikator PJPK



Pertanyaan

Adakah ada definisi operasional untuk 30 indikator PJPK?

Jawaban

Ditrenduk telah menyusun buku metadata 30 indikator PJPK. Penyusunan metadata 30 indikator tersebut melibatkan K/L pengampu terkait dan BPS selaku produsen data dari sebagian indikator tersebut. Buku tersebut dapat diakses di *website* layanan Ditrenduk Populer pada tautan:

<https://bit.ly/LayananPopulerDitrenduk>

Pertanyaan

Apakah 30 indikator PJPK wajib masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah?

Jawaban

Kondisi ideal adalah ketika (30 indikator) dapat masuk semua ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Terdapat empat kategori dalam internalisasi indikator ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah yaitu :

Sangat Baik : >25 indikator

Baik : 23-25 indikator

Sedang : 20-22 indikator

Kurang Baik : <20 indikator

Pertanyaan

Apakah indikator Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern sama dengan indikator mCPR?

Jawaban

Berbeda, mCPR hanya menjadi salah satu indikator penghitungan pada rumus indikator Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern.

Pertanyaan

Dari manakah **data baseline** 30 indikator PJPK tingkat provinsi dan kab/kota dapat **diperoleh ?**

Jawaban

Ditrenduk telah menyediakan **living database 30 indikator PJPK** untuk Provinsi dan Kab/Kota. **Living database** dapat diakses di <https://bit.ly/LayananPopulerDitr> **enduk** dengan **SOP** sebagai berikut :

1. Masuk ke **hotline gsite** layanan populer
<https://bit.ly/LayananPopulerDitr> **enduk**
2. Hubungi **hotline** WA layanan populer
3. Mengisi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
4. **Password** dan **user** akan dikirimkan

Pertanyaan

Bagaimana indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi yang diampu pada tingkat provinsi ?

Jawaban

Untuk di tingkat kab/kota tetap disusun Rencana Aksinya untuk mendukung indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi.

Pertanyaan

Apakah indikator Rata-Rata Lama Sekolah 25 tahun ke atas dapat digantikan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas?

Jawaban

Untuk indikator RLS, ada 2 kelompok umur, yaitu 15 tahun keatas dan 25 tahun keatas. Peruntukkan RLS 25 tahun keatas digunakan untuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada PJPk yang digunakan adalah RLS 15 tahun keatas.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Pengampu Indikator PJPK di Daerah



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Pengampu Indikator PJPK di Daerah

Pertanyaan

Diantara 30 indikator PJPK, manakah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi pengampu dari indikator berikut:

- a. Gini Ratio
- b. PDRB Perkapita
- c. Persentase Penambahan Ekstensifikasi Hasil Pajak
- d. Kepadatan Penduduk

Jawaban

Dalam aplikasi SIPD dapat dilihat dari tiap indikator yang tertuang informasi seperti definisi operasional, urusan *leading sector* dan lain-lain, sehingga bisa dipetakan lintas sektor terkait dan lintas sektor pengampu berdasarkan keterangan tersebut.

Instansi yang ditunjuk sebagai pengampu atau *leading sector* dengan mempertimbangkan kewenangan, keahlian dan peran atas penunjukkan.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Internalisasi PJPK ke Dalam Dokrenda



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Internalisasi PJPK ke Dalam Dokrenda

Pertanyaan

Bagaimana proses internalisasi PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah)?

Jawaban

Substansi PJPK yang diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) yaitu **sasaran, indikator dan target serta rencana aksi PJPK** sebagai referensi penyusunan rencana kerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam Dokrenda.

Proses internalisasi dilakukan secara simultan dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal/Rancangan dengan merumuskan tujuan, sasaran, outcome dalam RPJMD sampai dengan output Renstra Perangkat Daerah.

Permasalahan dan isu kependudukan daerah dimasukkan ke dalam Bab II rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya dapat diintegrasikan dalam bab-bab selanjutnya seperti visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kinerja sesuai dengan sistematika pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pertanyaan

Bagaimana **hasil pemetaan ketersediaan indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)?**

Jawaban

Dari 30 indikator, terdapat **28 indikator yang sudah tersedia** dan terdapat **2 indikator yang sedang dalam proses pengusulan.**



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Lain-Lain





Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

Lain-Lain



Pertanyaan

Apakah ada penghargaan (*reward*) untuk daerah yang telah menyusun PJPK dan memasukkan indikator ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau mencapai target indikator?

Jawaban

Terdapat mekanisme pemberian penghargaan kepada daerah yang telah menyusun PJPK dengan indikator yang akan dinilai adalah Kepemilikan Dokumen PJPK Berkualitas yang memenuhi 4 unsur berikut :

1. Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan minimal oleh Peraturan Kepala Daerah;
2. Indikator dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah minimal 75%;
3. Matriks analisis situasi kependudukan dan respons;
4. Matriks rencana aksi seluruh indikator PJPK.

Pertanyaan

Bagaimana memahami Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang didalamnya ada 5 indikator progam Bangga Kencana yaitu TFR, ASFR, mCPR, Unmet Need, Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga, sedangkan dalam PJPk ada 7 indikator yaitu TFR, ASFR, Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat dan cara KB modern, i-Bangga, Indeks Lansia Berdaya, Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja, Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri?

Jawaban

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan memberikan panduan kepada Pemda untuk bagaimana menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dan bukan menetapkan indikator-indikator yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Di dalam lampirannya mencantumkan kinerja dan indikatornya dalam Renstra, namun sifatnya rekomendasi. Tujuannya agar perangkat daerah memiliki gambaran terkait apa kinerja tertinggi (*ultimate outcome*) dan indikatornya di bawahnya yang hendak dicapai di masing-masing urusan. Jika perangkat daerah mau pakai indikator lain dipersilahkan sesuai dengan regulasi yang ada.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

FAQ

“Frequently Asked Question”

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



Pindai Untuk Informasi Lengkap Mengenai **PJPk**
Atau kunjungi link **<https://bit.ly/DitrendukPopuler>**



ditrenduk_kemendukbangga



ditrendukbkkbn22@gmail.com



+6281234456919



Ditrenduk BKKBN



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

FAQ

“Frequently Asked Question”

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



Pindai Untuk Informasi Lengkap Mengenai **PJPK**
Atau kunjungi link **<https://bit.ly/DitrendukPopuler>**



ditrenduk_kemendukbangga



ditrendukbkkbn22@gmail.com



+6281234456919



Ditrenduk BKKBN